

## DAFTAR PUSTAKA

- Afarahim. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010*. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Bangka Pos. (2018). *Ekonomi Babel Tumbuh Melambat 2,46 Persen*. Diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/> pada tanggal 25 November 2018 pukul 19:40 WIB.
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/> pada tanggal 18 November 2018 pukul 20:35 WIB.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2013). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harefa, Mandala, *et al.* (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Mukarramah, Habibatul. (2017). *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Lima Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulatsih, Endang Sri. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Jenius) Vol. 5 No. 53.
- Nggilu, Fadly *et al.* (2016). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 4.
- Novalista, Rizka Lutfita. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan*

*Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Accounting.*  
Volume 2 No.2

Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ratmono, Dwi dan Mahfud Solihin. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan Indonesia : Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sanusi, Anwar. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. (2013). *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sintia, Irma. (2017). *Kemandirian Keuangan Daerah Berimplikasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trisna, Nyoman dan Suzan, Leny. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)*. Jurnal e-proceeding of Management Vol.2 No.3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

